

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY- FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh:

Alfira Bilqis Indira Putri¹

Shellen Amabel Okdiyanti²

Nindia Ananta Zalfa Wijaya³

Deni Yuda Fatria⁴

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur
(60213).

Korespondensi Penulis: alfirabilqis.22028@mhs.unesa.ac.id,
shellenamabel.22030@mhs.unesa.ac.id, nindiaananta.22046@mhs.unesa.ac.id,
deniyuda.22049@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The Yogyakarta Special Region (DIY) government is collaborating with Finland in the fields of education, research, and technology. Through this collaboration, it is hoped that Finland can assist DIY in increasing vocational education opportunities, namely by adding D1, D2, and D3 Digital vocational study programs to open vocational majors in digital animation and programming. Because Finland is known for its adaptive vocational education system, integration with industry, and implementation of effective work-based learning. Based on the existing background, this research has high urgency both in theory and practice. Then, this research also aims to identify internal factors, analyze external factors, and formulate strategies to strengthen vocational cooperation based on a SWOT analysis to improve quality and competitiveness. Meanwhile, the research method used is a literature review method. Therefore, it is expected to provide a comprehensive understanding of the research topic and strengthen the theoretical basis. The results of the analysis that have been conducted by the researcher are also expected to provide input for local governments and educational institutions.*

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Keywords: *International Cooperation, SWOT Analysis, Paradiplomacy, and Vocational Education.*

Abstrak. Pemerintah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) melakukan kerjasama dengan Finlandia dalam bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Melalui kerjasama tersebut diharapkan Finlandia dapat membantu DIY untuk kerjasama dalam meningkatkan peluang pendidikan vokasi, yaitu dengan diadakan adanya penambahan program studi vokasi D1, D2, dan D3 Digital untuk membuka jurusan vokasi animasi digital dan juga programming. Karena Finlandia terkenal terhadap sistem pendidikan vokasi yang adaptif, berintegrasi terhadap industri, serta menerapkan *work-based learning* yang efektif. Melalui latar belakang yang ada, penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari sisi teori maupun praktik. Kemudian penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor internal, menganalisis faktor eksternal, serta merumuskan strategi penguatan kerjasama vokasi berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan kualitas serta daya saing. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kajian literatur atau studi pustaka. Oleh karena itu diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian serta memperkuat dasar teoritis. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah daerah serta lembaga pendidikan..

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Analisis SWOT, Paradiplomasi dan Vokasi.

LATAR BELAKANG

Pendidikan vokasi kini menjadi salah satu jawaban strategis bagi tantangan global dan nasional terkait transformasi tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan kompetensi (OECD, 2025). Di sejumlah negara maju seperti Finlandia, sistem *Vocational Education and Training (VET)* telah dikembangkan secara komprehensif dengan pemanfaatan pembelajaran berbasis tempat kerja (*work-based learning*) dan kemitraan erat antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah, peran VET tidak hanya terbatas pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan kerja (*employability*), kemampuan adaptasi kerja, serta koneksi nyata antara institusi pendidikan dan dunia industri. Hal ini menunjukkan Sebagai contoh, di Finlandia sekitar

4 dari 5 peserta VET menempuh program berbasis sekolah dengan skema pelatihan di tempat kerja sebagai bagian integralnya. Di tengah dinamika globalisasi, digitalisasi, dan perubahan struktur pekerjaan, sistem vokasi (*vocational education and training – VET*) dituntut untuk tidak menghasilkan lulusan dengan keterampilan dasar, tetapi juga lulusan yang memiliki kesiapan kerja (*employability*), kemitraan dengan industri, serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang semakin kompleks. Penelitian nasional menunjukkan bahwa di Indonesia, tantangan utama pendidikan vokasi antara lain adalah ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri (mismatch), kurangnya sinergi antara institusi pendidikan dan dunia usaha/industri (DUDI), serta kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kerja (*work-based learning*) yang memadai (Direktorat SMK Kemendikdasmen, 2025).

Hadirnya era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur pekerjaan dan berbagai jenis keterampilan yang kelak akan dibutuhkan oleh industri yang mendorong perkembangan teknologi seperti munculnya kecerdasan buatan, *Internet of Things*, *Big Data* dan otomatisasi membuat kebutuhan mengenai permintaan tenaga kerja yang terampil, berkompentensi profesional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi meningkat pesat, hal ini mendorong pendidikan vokasi untuk mencetak sumber daya manusia yang praktis dan siap kerja sesuai dengan permintaan. Pada daerah sub-urban, tantangan terhadap pendidikan vokasi untuk melakukan transformasi mendasar dengan cara memperbaharui kurikulum berbasis kebutuhan industri, integrasi teknologi pembelajaran, peningkatan kompetensi pengajar dan penguatan kerjasama dalam sektor industri yang tentunya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah sebagai jembatan untuk mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. (Muharam dkk, 2025)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada pendidikan vokasi mencapai 4,31%, kondisi ini menunjukkan adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki pada pendidikan vokasi dengan kebutuhan atau permintaan dunia kerja dan industri yang dimana kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pendidikan vokasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu menghadapi tantangan dalam transformasi ekonomi dan teknologi sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerja sama antar wilayah secara internasional khususnya dengan negara yang memiliki sistem pendidikan

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

yang unggul terutama dalam bidang pendidikan vokasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merealisasikan kerjasama ini, maka diperlukan adanya paradiplomasi.

Paradiplomasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh entitas subnasional atau *sub-state* dalam melakukan kegiatan diplomasi dengan mitra luar negerinya (Alam & Arin, 2020). Hal ini berdasarkan pendapat Daniel Bell yang menyatakan bahwa negara sudah terlalu besar dalam menyelesaikan permasalahan atau mengurus hal - hal kecil dan disaat yang sama negara terlalu kecil mengurus hal - hal yang besar, oleh karena itu negara tidak lagi menjadi aktor tunggal sehingga aktor - aktor subnasional seperti provinsi dan kota mulai mengambil alih dan turut serta dalam aktivitas hubungan internasional demi kepentingan masing - masing entitas yang saling bersangkutan. Menurut Alexander dalam (Novialdi & Rassanjani, 2020) definisi paradiplomasi yang dapat menjadi salah satu cara pemerintah untuk membagi kekuasaannya dengan pemerintah provinsi dalam hubungan internasional dan berpendapat bahwa paradiplomasi merupakan fungsi utama dari nasionalisme tanpa negara, menunjukkan bahwa proses nasionalisme (konstruksi identitas definisi atau artikulasi kepentingan dan teritorial politik mobilisasi).

Hal ini secara tidak langsung dapat mendorong pemerintah daerah untuk berupaya dalam mengembangkan kepribadian secara internasional, demikian paradiplomasi memiliki fungsi sebagai sarana pembangunan identitas dan bangsa serta menopang dan mempromosikan kepentingan tertentu. Kerjasama secara paradiplomasi ini telah berdasarkan landasan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan daerah otonomi untuk melakukan kerja sama dengan luar negeri yang terdapat dalam pasal 42 ayat (1) bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun kewenangan dalam melakukan hubungan internasional bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan daerah telah menjadi sebuah keharusan untuk menjalankan kerja sama dengan negara lain secara internasional dikarenakan arus globalisasi di dunia yang telah merambah ke seluruh aspek. Pemerintah Daerah selaku pelaksana pemerintahan sekaligus pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis dalam aspek investasi, perdagangan, pariwisata dan juga pendidikan akan mengalami kemunduran apabila tidak menjalankan kerjasama secara internasional.

Pemerintah Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) melakukan kerjasama dengan Finlandia dalam bidang pendidikan, riset dan teknologi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia yang dimana dalam pertemuan tersebut Gubernur DIY menginginkan adanya kerjasama antara Finlandia dengan DIY terutama terkait edukasi riset dan teknologi yang mengharapakan Finlandia dapat membantu DIY untuk kerjasama dalam meningkatkan peluang pendidikan Vokasi. Dalam kerjasama terkait pendidikan Vokasi, Gubernur DIY menginginkan adanya penambahan program studi Vokasi D1, D2 dan D3 Digital untuk membuka jurusan vokasi animasi digital maupun programming, hal ini tentunya akan meningkatkan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap kerja dan berkompeten sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja. Pihak dari Finlandia menyetujui untuk melakukan kerjasama ini terutama dalam bidang riset dan teknologi yang dapat dilakukan dengan pusat, setingkat kota atau konsorsium.

Finlandia terkenal akan sistem pendidikan vokasi yang adaptif, berintegrasi terhadap industri, menerapkan *work-based learning* yang efektif. Negara ini berhasil dalam memposisikan pendidikan vokasi sebagai jalur strategis yang sama pentingnya dengan pendidikan akademik (OECD, 2022). Upaya kerjasama yang telah dijalankan antara Indonesia dengan Finlandia dalam bidang pendidikan vokasi mulai meningkat secara signifikan sejak tahun 2023 yang dinamakan program *Indonesia - Finlandia Education Partnership* yang telah difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2025) Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam aspek pendidikan vokasi antara pemerintah daerah DIY dengan Finlandia dapat dijadikan strategi yang relevan untuk meningkatkan daya saing lulusan vokasi.

Dengan latar-belakang tersebut, penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari sisi teori maupun praktik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pendidikan vokasi internasional dan kerangka analisis SWOT yang diaplikasikan pada kerjasama lintas negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi institusi vokasi di DIY, pemerintah daerah, serta mitra Finlandia dalam merancang dan mengelola kerjasama yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-internal (kekuatan dan kelemahan) dalam kerjasama pendidikan vokasi DIY–Finlandia; menganalisis faktor-eksternal

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

(peluang dan ancaman) yang melekat pada kerjasama tersebut; dan merumuskan strategi penguatan kerjasama vokasi berdasarkan analisis SWOT agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan vokasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pendidikan vokasi dan kerjasama internasional.

KAJIAN TEORITIS

Paradiplomasi

Paradiplomasi dapat dikatakan sebagai fenomena yang tergolong baru dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Ivo Duchacek (1990) Menjelaskan bahwa *paradiplomacy* adalah keterlibatan pemerintah daerah atau subnasional (seperti provinsi dan kota) dalam hubungan internasional, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, secara langsung dengan aktor asing tanpa melalui pemerintah pusat. Paradiplomasi sebagai kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan kepentingan ekonomi, sosial, dan politiknya di luar negeri dalam kerangka sistem politik nasional (Panayotis Soldatos, 1990).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerja sama luar negeri ini terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain sister city/province, Pemda juga dapat membuat perjanjian kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan melakukan hubungan internasional atau dengan pihak asing dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, masuk dalam kategori kewenangan Tidak Wajib bagi Daerah. Meskipun kewenangan melakukan hubungan internasional ini bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi dunia yang telah merambah ke seluruh pelosok nusantara. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaur ke dalam pergaulan masyarakat internasional. Daerah yang tidak terampil

dalam pergaulan dunia pasti akan ketinggalan, sebab daerah itu hanya akan menjadi konsumen pasif saja dari seluruh proses perdagangan dunia atau kapitalisme global (Mukti, 2013).

Bentuk paradiplomasi sangat beragam proyek infrastruktur bersama, dan kolaborasi penanganan isu lintas batas. *Sister-city* atau *sister-province agreement*, yaitu kemitraan resmi antara dua wilayah di negara berbeda yang bertujuan memperkuat hubungan sosial, ekonomi, dan budaya (Supriyadi, 2023). Kerjasama pendidikan dan pelatihan vokasi, paradiplomasi juga banyak diwujudkan melalui kerja sama pendidikan lintas negara, seperti *student exchange*, *teacher training*, *joint curriculum development*, dan program magang internasional. Konsorsium riset dan inovasi internasional, Bentuk ini bertujuan mempercepat transfer teknologi, mendukung riset aplikatif, dan memperkuat daya saing inovasi lokal (Tavares, 2021).

Promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata internasional, Pemerintah daerah kini aktif melakukan kegiatan *business matching*, *trade missions*, dan pameran investasi luar negeri untuk menarik investor global. Melalui kegiatan ini, daerah tidak hanya memperkenalkan potensi ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi dalam rantai nilai global (Fitriani & Nurmandi, 2024)

Manfaat paradiplomasi bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan kerja sama serta jaringan internasional, paradiplomasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga asing di luar negeri, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Paradiplomasi juga mampu meningkatkan ekonomi daerah, karena melalui kerjasama perdagangan, promosi produk lokal, dan investasi paradiplomasi dapat meningkatkan ekspor daerah serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah tersebut. Adapun mentransfer pengetahuan serta teknologi (Knowledge dan technology transfer) dapat memungkinkan daerah memperoleh akses terhadap inovasi teknologi, sistem pendidikan dan praktik tata kelola modern dari negara mitra.

Kerjasama Pendidikan Vokasi

Kerjasama internasional di bidang pendidikan vokasi merupakan bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan daya saing sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Pendidikan

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

vokasi sendiri dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kombinasi pembelajaran di kelas dan praktik industri (*work-based learning*).

Menurut OECD (2024), sistem pendidikan vokasi di Finlandia merupakan salah satu model terbaik di dunia karena berbasis kompetensi (*competence-based learning*), berorientasi pada kebutuhan industri, serta menekankan kolaborasi erat antara lembaga pendidikan dan perusahaan. Keunggulan sistem vokasi Finlandia terletak pada mekanisme *dual training* yakni pembelajaran di sekolah dikombinasikan dengan magang di industri dan sistem asesmen yang mengakui pengalaman kerja sebagai bagian dari sertifikasi kompetensi (Cedefop, 2024).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan vokasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Laporan INJOE (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga vokasi di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem pembelajaran berbasis industri. Permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan sarana praktik, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, serta minimnya kapasitas instruktur. Kondisi ini juga diidentifikasi di wilayah DIY, meskipun daerah ini dikenal memiliki ekosistem pendidikan yang maju dan basis industri kreatif yang kuat.

Kerjasama pendidikan vokasi antara DIY dan Finlandia yang mulai dijejaki sejak tahun 2024 menjadi peluang strategis untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Berdasarkan berita resmi Pemerintah Daerah DIY (2024), kerja sama ini mencakup pengembangan program vokasi digital seperti animasi, teknologi informasi, dan desain, serta pelatihan bagi tenaga pendidik. Tujuannya adalah membangun *link and match* antara pendidikan vokasi di DIY dengan sistem pembelajaran Finlandia yang adaptif terhadap kebutuhan industri global.

Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2021), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), serta secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT berfungsi sebagai dasar bagi organisasi untuk menilai kesiapan sumber

daya internal terhadap tantangan pasar eksternal, terutama dalam konteks digitalisasi bisnis global.

Secioputri & Putro (2024) menunjukkan bahwa analisis strategis perusahaan infrastruktur sudah menggunakan matriks SWOT maupun TOWS yang memasukan aspek (*ESG — Environmental, Social, and Governance*) sebagai elemen strategis utama. Pendekatan ini memperluas fungsi SWOT sebagai instrumen untuk menilai keberlanjutan organisasi di tengah meningkatnya tekanan global terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab (*Journal of Sustainable Business Strategy*). SWOT juga memiliki peran sebagai “jembatan strategis” antara diagnosis kondisi organisasi dan formulasi kebijakan jangka panjang. Melalui pemetaan sistematis faktor internal dan eksternal, analisis SWOT memungkinkan manajer mengambil keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision-making*) serta menyesuaikan arah strategi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah.

Analisis SWOT dalam dunia pendidikan merupakan alat strategis yang digunakan untuk menilai kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan akademik maupun manajerialnya. Melalui pendekatan ini, sekolah, perguruan tinggi, maupun institusi vokasi dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor internal seperti kualitas tenaga pendidik, kurikulum, sarana-prasarana, serta efisiensi manajemen, dan mengidentifikasi faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, serta tuntutan pasar kerja. Menurut Santoso & Lestari (2022), penerapan analisis SWOT dalam pendidikan membantu lembaga merancang strategi pengembangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Kamarudin (2024), menjelaskan mengenai integrasi SWOT dengan analisis *Balanced Scorecard* dan *Scenario Planning* untuk menghasilkan strategi yang lebih terukur dan realistis. Pendekatan kombinitif ini dinilai lebih efektif untuk lembaga pendidikan yang menghadapi perubahan cepat akibat digitalisasi dan globalisasi. Secara konseptual, hasil analisis SWOT biasanya dituangkan dalam empat kategori utama:

1. *Strengths* (kekuatan) – faktor internal yang menjadi keunggulan organisasi, seperti kompetensi tenaga pengajar, reputasi lembaga, pengembangan fasilitas pendidikan.

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

2. *Weaknesses* (kelemahan) – faktor internal yang menjadi hambatan, seperti keterbatasan dana, kurangnya inovasi kurikulum yang ada, dan Kualitas instruktur yang belum merata
3. *Opportunities* (peluang) – faktor eksternal yang memberikan potensi pertumbuhan, seperti peluang kerja sama internasional, kemajuan teknologi pembelajaran dan pembelajaran digital
4. *Threats* (ancaman) – faktor eksternal yang dapat mengancam keberlanjutan, seperti perubahan kebijakan dan kompetisi global.

Dengan demikian, analisis SWOT bukan sekadar alat identifikasi, melainkan juga sarana reflektif untuk memahami posisi lembaga pendidikan dalam konteks persaingan global dan kerja sama internasional. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengkaji secara strategis kerjasama pendidikan vokasi antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Finlandia, yang berfokus pada peluang dan tantangan yang muncul dari sinergi kedua sistem pendidikan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah bagian terpenting dari pada suatu bidang ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai memainkan peran yang penting di dalam suatu pembangunan ilmu pengetahuan (Adlini dkk, 2022) Oleh karena itu didalam suatu penelitian tentunya akan membutuhkan sebuah metode dalam penelitian. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Metode penelitian merupakan prosedur serta skema yang digunakan dalam suatu penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian, maka penelitian dapat dilakukan secara lebih terencana. Peneliti menggunakan metode kajian literatur atau studi pustaka dalam penelitian ini. Menurut Zed dalam (Adlini dkk, 2022) Studi pustaka merupakan jenis penelitian dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori - teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, terdapat empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode kajian literatur, yakni terdapat beberapa tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu memilih fokus kajian, mencari informasi serta mengkaji teori yang relevan, mencari landasan teori

melalui para ahli maupun hasil dari penelitian terdahulu, setelah itu landasan teori tersebut dapat dianalisis lalu ditarik kesimpulannya. Metode kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian serta memperkuat dasar teoritis yang menjadi pijakan dalam pembahasan.

Metode kajian literatur ini digunakan untuk menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait kerja sama pendidikan vokasi antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Finlandia dengan pendekatan analisis SWOT, guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi penguatan kerjasama pendidikan vokasi berbasis internasional di Indonesia. Hasil analisis ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi yang lebih efektif dan berdaya saing global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara mitra atau yang dikenal sebagai paradiplomasi (*paradiplomacy*) telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Konsep paradiplomasi, yakni keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri untuk kepentingan lokal semakin relevan, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan yang bersifat lintas-sektoral seperti urbanisasi, perubahan iklim, hingga transformasi digital (Luhukay et al., 2025). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu pusat pendidikan dan budaya di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kerjasama internasional semacam ini, khususnya dengan negara-negara yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang pendidikan dan inovasi teknologi seperti Finlandia. Finlandia, yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia berdasarkan *Programme for International Student Assessment* (PISA), menjadi salah satu mitra strategis yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kualitas pendidikan vokasi dan riset di Daerah Istimewa Yogyakarta (Agustyaningrum & Himmi, 2022).

Berdasarkan potensi kerjasama tersebut, inisiatif kerjasama internasional antara Pemerintah Daerah DIY dan Finlandia telah dirintis melalui pertemuan antara Gubernur

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada bulan November 2024. Pertemuan yang berlangsung intens dan produktif tersebut menghasilkan berbagai usulan kerjasama konkret di bidang pendidikan vokasi, riset dan teknologi, serta energi terbarukan. Kerjasama internasional daerah seperti ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dan kerjasama internasional dalam rangka mendukung pembangunan daerah (Star & Pally, 2022). Untuk menganalisis potensi dan tantangan dari kerjasama internasional daerah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari *strengths* (kelebihan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (tantangan) untuk memetakan secara komprehensif aspek-aspek strategis dari kerjasama DIY-Finlandia.

Kelebihan Kerjasama DIY-Finlandia (*Strengths*)

Komitmen politik yang kuat dari kepala daerah menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan kerjasama internasional daerah. Sri Sultan sebagai Gubernur DIY secara langsung menyampaikan usulan-usulan konkret dan terukur terkait kerjasama pendidikan vokasi, riset, dan teknologi kepada Dubes Finlandia (Humas PEMDA DIY, 2024). Keterlibatan langsung pemimpin daerah dalam paradiplomasi ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut memiliki dukungan politik dan komitmen kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah. Dalam konteks paradiplomasi, kepemimpinan kepala daerah yang visioner menjadi determinan utama keberhasilan hubungan luar negeri daerah. Menurut Pfeffer & Salancik dalam Sudarmanto et al. (2021), dukungan politik dari *top management* merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan program kerjasama internasional karena mempengaruhi alokasi sumber daya dan prioritas organisasi.

Selain komitmen politik, ketersediaan infrastruktur pendidikan vokasi juga menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. DIY telah memiliki Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta (AKNSB Yogyakarta) yang berlokasi di Jalan Parangtritis, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Meskipun di Tahun 2024 AKNSB Yogyakarta baru menyelenggarakan satu program studi yaitu Diploma 1 (D1) bidang seni dan kebudayaan, keberadaan institusi ini menjadi *existing capacity* (kapasitas yang sudah

ada) yang dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan Finlandia. Lebih dari itu, para lulusan AKNSB Yogyakarta telah terbukti mampu tampil di kancah internasional dan berkecimpung sebagai pendamping desa budaya, yang menunjukkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan sudah memiliki standar yang baik dan berpotensi untuk ditingkatkan melalui *transfer knowledge* dari Finlandia (Rochmad, 2023).

Pengalaman positif dalam mengelola kerjasama internasional sebelumnya juga menjadi indikator kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi. DIY memiliki *track record* yang baik dalam kerjasama internasional daerah dengan negara lain, seperti kerjasama dengan Jerman dalam Proyek Bribin pada tahun 2004 di bidang energi untuk mengatasi masalah kelangkaan air di wilayah Gunung Kidul. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah DIY memiliki kapasitas administratif dan manajerial untuk mengelola program kerjasama internasional yang kompleks, termasuk dalam hal koordinasi dengan pemerintah pusat, negosiasi dengan mitra asing, dan implementasi program di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Hidayatno (2025), pengalaman kerjasama sebelumnya menciptakan *institutional memory* yang memudahkan implementasi kerjasama baru karena organisasi telah memiliki pemahaman tentang prosedur, mekanisme koordinasi, dan *potential challenges* yang mungkin dihadapi.

Di sisi lain, keterbukaan dan fleksibilitas Finlandia terhadap berbagai mekanisme kerjasama memberikan ruang yang luas bagi implementasi program paradiplomasi. Dubes Finlandia menyatakan bahwa Finlandia terbuka untuk berbagai skema kerjasama, baik dengan pemerintah pusat Indonesia, pemerintah daerah setingkat provinsi/kota, maupun melalui konsorsium yang melibatkan berbagai institusi (Humas PEMDA DIY, 2024). Fleksibilitas mekanisme ini tentunya memudahkan implementasi kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, Finlandia juga membuka kesempatan bagi mahasiswa dan pelajar Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Finlandia melalui berbagai program beasiswa, serta menawarkan program *teacher training* yang dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik di DIY (Hakim, 2024)

Kelemahan Kerjasama DIY-Finlandia (*Weaknesses*)

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, keterbatasan kapasitas institusi pendidikan vokasi yang ada menjadi hambatan dalam pengembangan program baru. Di tahun 2024, AKNSB Yogyakarta hanya menyelenggarakan satu program studi D1 bidang seni dan kebudayaan. Untuk mengembangkan program studi baru seperti D1, D2, atau D3 Digital dengan jurusan vokasi animasi digital dan programming sebagaimana diusulkan oleh Sri Sultan, diperlukan persiapan komprehensif meliputi penyiapan kurikulum berbasis kompetensi, rekrutmen dosen berkualifikasi sesuai, pembangunan fasilitas laboratorium dan studio, serta penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Proses transformasi institusi ini tentunya membutuhkan investasi signifikan dalam hal waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang mungkin menjadi kendala bagi pemerintah daerah.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah ketergantungan pada transfer teknologi dan bantuan luar negeri yang menunjukkan belum adanya kemandirian teknologi daerah. Sebagaimana terlihat dari Proyek Bribin yang teknologi dan peralatannya berasal dari bantuan murni (*grant*) pemerintah Jerman, DIY masih memiliki ketergantungan tinggi pada bantuan teknologi dari negara donor (Attitoh, 2024). Setelah periode kerjasama dengan Jerman selesai, fasilitas Proyek Bribin kini tidak lagi beroperasi secara optimal dan membutuhkan bantuan Finlandia untuk mengaktifkannya kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa DIY belum sepenuhnya mandiri dalam hal penguasaan teknologi (*technology mastery*), kemampuan adaptasi dan inovasi teknologi, serta pemeliharaan infrastruktur berbasis teknologi, yang dapat mengurangi efektivitas jangka panjang dari kerjasama internasional.

Terakhir, belum adanya dokumen perencanaan dan *roadmap* kerjasama yang detail juga menjadi kelemahan struktural dalam pelaksanaan paradiplomasi DIY. Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati untuk melakukan kerjasama dan akan mengadakan forum atau pertemuan lanjutan, namun belum terdapat dokumen perencanaan strategis yang spesifik, terukur, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Oleh karena itu, masih diperlukan serangkaian pembahasan teknis untuk merinci bentuk konkret kerjasama (*modality*), target dan indikator keberhasilan yang terukur (*measurable outcomes*), *timeline* implementasi program, mekanisme pembagian tanggung jawab, sumber dan skema pembiayaan, serta *exit strategy* untuk memastikan keberlanjutan program. Terkait hal ini, Bryson dalam Evam (2025) menekankan pentingnya *strategic*

planning yang komprehensif dalam kerjasama internasional untuk memastikan kejelasan tujuan, peran, dan ekspektasi semua pihak yang terlibat, serta meminimalkan risiko kegagalan implementasi.

Peluang Kerjasama DIY-Finlandia (*Opportunities*)

Transformasi dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi membuka peluang besar untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Dengan adanya kerjasama pendidikan vokasi, khususnya penambahan program studi D1, D2, atau D3 Digital dengan jurusan animasi digital dan programming, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan industri (*industry-ready graduates*). Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia berdasarkan berbagai survei global seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA), sehingga transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) dan metodologi pembelajaran berbasis kompetensi dari Finlandia dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan vokasi di DIY (Agustyaningrum & Himmi, 2022). Selain itu, program teacher training yang ditawarkan Finlandia juga dapat meningkatkan keterampilan mengajar tenaga pendidik di DIY, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran.

Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, peningkatan daya serap tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terdidik juga menjadi dampak positif dari kerjasama internasional ini. Dengan tersedianya program pendidikan vokasi yang kurikulumnya dirancang sesuai dengan kebutuhan riil industri (*demand-driven curriculum*), diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran karena lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mudah terserap ke dunia kerja. Lulusan yang memiliki keterampilan di bidang digital seperti animasi, *programming*, dan teknologi informasi sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital ekonomi (Pratama, 2022). Lebih jauh lagi, ketersediaan tenaga kerja terampil ini juga dapat menarik investasi perusahaan teknologi untuk membuka kantor atau pusat pengembangan di DIY, sehingga menciptakan efek multiplier terhadap perekonomian daerah (Dhyanasaridewi, 2020).

Tidak kalah penting, pengembangan model pendidikan yang mengintegrasikan keunggulan global dengan kearifan lokal juga menjadi peluang inovasi unik yang dapat menjadi keunggulan kompetitif DIY. Sri Sultan secara eksplisit menekankan pentingnya

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

local wisdom (kearifan lokal) dalam sistem pendidikan, yang pernah dikenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara melalui filosofi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, kerjasama dengan Finlandia membuka peluang untuk mengembangkan model pendidikan *hybrid* yang memadukan keunggulan sistem pendidikan Finlandia dengan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta yang kaya akan warisan budaya dan filosofi Jawa (Humas PEMDA DIY, 2024). Model pendidikan semacam ini dapat menjadi *best practice* bagi daerah lain di Indonesia bahkan di tingkat internasional, yang menunjukkan bahwa modernisasi dan internasionalisasi pendidikan tidak harus menghilangkan identitas budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, melainkan justru dapat saling memperkuat dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten secara global namun tetap berakar pada budaya lokal.

Tantangan Kerjasama DIY-Finlandia (*Threats*)

Hambatan komunikasi lintas budaya dan bahasa menjadi tantangan utama dalam implementasi kerjasama internasional daerah (Mudrik & Fawwaz, 2024). Finlandia menggunakan bahasa Finlandia (Suomi) dan Swedia sebagai bahasa resmi, yang memiliki struktur linguistik sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Meskipun dalam komunikasi formal dan akademik internasional dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa universal, namun dalam implementasi program-program teknis seperti *teacher training* atau pertukaran pelajar, hambatan bahasa dapat menjadi kendala signifikan dalam proses *transfer knowledge* yang efektif. Lebih dari itu, perbedaan budaya kerja (*work culture*) dan etika komunikasi juga memerlukan proses adaptasi dari kedua belah pihak. Budaya kerja Finlandia yang sangat menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, lingkungan kerja yang kolaboratif, serta fokus pada inovasi teknologi mungkin memerlukan penyesuaian dengan budaya organisasi di Indonesia yang cenderung lebih hierarkis dan mengutamakan harmoni dalam komunikasi (Jufri, 2025).

Selain hambatan komunikasi, keterbatasan anggaran dan kompleksitas skema pembiayaan juga menjadi hambatan finansial yang serius dalam pelaksanaan paradiplomasi. Pengembangan program studi baru yang berkualitas internasional, pembangunan dan pemutakhiran infrastruktur pendidikan seperti laboratorium dan studio digital, pelaksanaan penelitian kolaboratif, pengiriman dosen dan mahasiswa untuk pelatihan atau studi ke Finlandia, serta reaktivasi dan modernisasi proyek energi

membutuhkan investasi finansial yang sangat besar. Meskipun Finlandia menawarkan berbagai program kerjasama, namun tidak semua komponen program akan dibiayai penuh oleh pihak Finlandia. Pada kenyataannya, banyak program kerjasama internasional yang menerapkan prinsip *cost-sharing* atau *counterpart contribution* yang mengharuskan pihak Indonesia menyediakan kontribusi pembiayaan tertentu (Nurarafah, 2025). Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY yang harus dialokasikan untuk berbagai prioritas pembangunan, pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, skema *public-private partnership*, atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kompleksitas regulasi dan birokrasi dalam kerjasama internasional daerah yang dapat memperlambat realisasi program. Kerjasama luar negeri yang melibatkan pemerintah daerah harus mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan dan prosedur administratif yang kompleks, baik dari pihak Indonesia maupun Finlandia (Renayanthi & Wijaya, 2020). Di Indonesia, kerjasama internasional daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam hubungan luar negeri, serta berbagai peraturan pelaksanaan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi terkait lainnya (Violeta et al., 2024). Sebagai konsekuensinya, proses birokrasi yang meliputi konsultasi dan koordinasi antar instansi, penyusunan naskah perjanjian, hingga penandatanganan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang dapat memperlambat realisasi program kerjasama di lapangan dan mengurangi momentum awal.

Terakhir, risiko keberlanjutan program pasca berakhirnya periode kerjasama juga memerlukan perhatian serius dalam perencanaan paradiplomasi. Pengalaman dari Proyek Bribin memberikan pelajaran penting bahwa tanpa strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) yang jelas dan komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, fasilitas dan hasil-hasil kerjasama dapat menjadi tidak berfungsi setelah periode kerjasama berakhir dan pihak donor tidak lagi terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program antara lain ketersediaan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan rutin, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengoperasikan dan memelihara teknologi, sistem manajemen aset yang baik, serta komitmen dari *stakeholder* lokal

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

terhadap hasil-hasil kerjasama (Hakim & Lubis, 2024). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan sejak awal mengenai mekanisme pengalihan pengelolaan, pelatihan berkelanjutan yang intensif bagi SDM lokal, penyiapan anggaran pemeliharaan dalam APBD jangka panjang, dan pembentukan unit pengelola yang memiliki kewenangan serta sumber daya yang jelas untuk memastikan keberlanjutan manfaat kerjasama bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerjasama internasional antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Finlandia merupakan bentuk paradiplomasi yang strategis dalam memperkuat kapasitas daerah di bidang pendidikan vokasi, riset, dan teknologi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kerjasama ini memiliki kekuatan berupa komitmen politik yang kuat dari kepala daerah, dukungan kelembagaan yang memadai, serta pengalaman positif dalam pelaksanaan kerjasama internasional sebelumnya. Namun, kelemahan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas institusi pendidikan vokasi, ketergantungan terhadap bantuan teknologi luar negeri, dan belum tersusunnya roadmap yang jelas. Di sisi lain, peluang besar muncul dalam peningkatan kualitas pendidikan vokasi, penguatan daya saing tenaga kerja, serta pengembangan model pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan keunggulan sistem pendidikan Finlandia. Adapun tantangan yang perlu diantisipasi meliputi hambatan komunikasi lintas budaya, keterbatasan pendanaan, kompleksitas regulasi, dan risiko keberlanjutan program pasca-kerjasama. Keberhasilan implementasi kerjasama DIY–Finlandia sangat bergantung pada perencanaan strategis, komitmen politik yang konsisten, serta mekanisme pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- (INJOE), I. J. (2024). *Laporan pendidikan vokasi Indonesia 2024: Tantangn dan peluang implementasi pembelajaran berbasis industri*. Jakarta: Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (OECD), O. f.-O. (2024). *Vocational education and training in Finland: Strengthening competence-based learning for the future workforce*. Paris: OECD Publishing.

- Aprillia Dwi Rasdiyanti, S. (2022). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China. *Jurnal Aplikasi Administrasi*.
- Attitoh, S. S. (2024, Juni 26). *erjasama Bribin IWRM: Perwujudan Ketersediaan Air Bersih di Gunungkidul*. From Kumparan: <https://kumparan.com/sitisubeqiyatunattitoh/kerjasama-bribin-iwrm-perwujudan-ketersediaan-air-bersih-di-gunungkidul-230OC7Lj3hB>
- Bahasa, N. (2025, Oktober 1). *Fakta Menarik tentang Budaya Kerja Finlandia yang Inovatif*. From NewsBytes Bahasa: <https://bahasa.newsbytesapp.com/news/science/fakta-menarik-tentang-budaya-kerja-finlandia-yang-inovatif/story>
- Dhyanasaridewi, I. G. (2020). Analisis Digitalisasi Industri, Penciptaan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Jurnal Komleksitas*.
- Dr. Yurisman Star, S. A. (2022). Urgensi Kerja sama Sister Province/City Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Diplomasi Daerah. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*.
- Eko Sudarmanto, E. S. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Freesia Aryunia Zafilia Basalama Luhukay, N. H. (2025). Paradiplomasi Multi-Sektor dalam Kerja Sama Sister City: Studi Kasus Tangerang Selatan dan Daejon. *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial*.
- Geraldine Renyanthi, E. W. (2020). Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri (Perspektif Hukum Administrasi Negara). *SELISIK*.
- Gilang Nur Alam, A. S. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerjasama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Gisella Linardy, J. L. (n.d.). Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA.
- Grace Lucy Secioputri, U. S. (2025). Aligning Corporate Strategy with Environmental, Social, and Governance (ESG): A Case Study of InfraTrans. *Journal Integration of Management Studies*.
- Group, C. C. (2025, Februari 3). *Pentingnya Perencanaan Strategis: Inspirasi Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisation dalam Menyusun Rencana Strategis*. From CCG Blog (Cognoscenti Consulting Group): <https://ccg.co.id/blog/2025/02/03/pentingnya-perencanaan-strategis-inspirasi->

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

strategic-planning-for-public-and-nonprofit-organisation-dalam-menyusun-rencana-strategis/

Hidayatno. (2025, Maret 12). *Memori Institusi*. From Hidayatno's Blog: [https://hidayatno.id/2025/03/12/memori-institusi/#:~:text=Namun%2C%20konsep%20serupa%20juga%20berlaku%20dalam%20organisasi,pemerintahan%20dalam%20bentuk%20memori%20institusi%20\(institutional%20memory\).](https://hidayatno.id/2025/03/12/memori-institusi/#:~:text=Namun%2C%20konsep%20serupa%20juga%20berlaku%20dalam%20organisasi,pemerintahan%20dalam%20bentuk%20memori%20institusi%20(institutional%20memory).)

Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Republik Indonesia.

Kebudayaan, P. D.–D. (2023, Februari 3). *Disbud DIY Buka Peluang Lebar Alumni AKNSB Yogyakarta Jadi Pendamping Desa Budaya*. From AKNSB Yogyakarta: <https://aknyogya.ac.id/berita/read/Disbud-DIY-Buka-Peluang-Lebar-Alumni-AKNSB-Yogyakarta-Jadi-Pendamping-Desa-Budaya>

Kemendikbudristek. (2024). *Program Kemitraan Pendidikan Indonesia-Finlandia*. From Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: <https://www.kemdikbud.go.id>

Lukman Hakim, M. D. (n.d.). Program Pengembangan Masyarakat: Evaluasi Efektivitas dan Keberlanjutan di Era Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*.

Menengah, D. S. (2025, Juni 11). *Penguatan Kemitraan Pendidikan Vokasi, Direktorat SMK Dorong Sinergi Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk Cetak SDM Tangguh*. From Direktorat SMK Kemendikdasmen: https://smk.kemendikdasmen.go.id/berita/penguatan-kemitraan-pendidikan-vokasi-direktorat-smk-dorong-sinergi-sekolah-dengan-dunia-usaha-dan-dunia-industri-untuk-cetak-sdm-tangguh?utm_

Miza Nina Adlini, A. H. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul (Jurnal Pendidikan)*.

Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh PEMDA di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

News, A. (2024, November 4). *Sultan HB X–Dubes Finlandia Bahas Peluang Kerja Sama Berbagai Bidang*. From ANTARA News: <https://www.antaranews.com/berita/4442569/sultan-hb-x-dubes-finlandia-bahas-peluang-kerja-sama-berbagai-bidang>

- Nina Agustyaningrum, N. H. (2022). Best Practices Sistem Pendidikan di Finlandia sebagai Refleksi Sistem Pendidikan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* .
- Nizar Mudrik, Z. E. (2024). Komunikasi Lintas Budaya: Konsep, Tantangan, dan Strategi Pengembangannya. *Selasar KPI : Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*.
- Nopember, I. T. (2023, Juli 1). Pentingnya Keterampilan Digital di Era Digital 4.0. From Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS News): <https://www.its.ac.id/news/2023/07/01/pentingnya-keterampilan-digital-di-era-digital-4-0/>
- Nurarafah, T. K. (2025). Principles of Good Faith in the Reimbursement of Expenses within Oil and Gas Revenue Sharing Agreements in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.
- Pegi Olivia Violeta, D. D. (2024). Pembinaan dan Pengawasan Pusat Fasilitas Kerja Sama Kementerian dalam Negeri terhadap Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.
- Pradina, D. P. (n.d.). Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Transportasi Publik (Kajian Transportasi BRT Kota Semarang - Kab. Semarang).
- Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rendy Adiwilaga, M. U. (2023). Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung . *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Riki Satia Muharam, U. A. (2025). Revitalisasi Pendidikan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri 4.0: Implikasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Sub-Urban. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* .
- Risky Novialdi, S. R. (2020). Optimizing the Ability of Aceh Province in Paradiplomacy Practice. *Nation State: Journal of International Studies*.
- Statistik, B. P. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenjang Pendidikan*. From Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>
- Torue, S. N. (2020, Mei 28). 7 Sistem Pendidikan Finlandia yang Disebut Negara dengan Keberhasilan Pendidikan. From SMA Negeri 1 Torue:

ANALISIS SWOT KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASI DIY-FINLANDIA: PELUANG DAN TANTANGAN

<https://sman1torue.sch.id/7-sistem-pendidikan-finlandia-yang-disebut-negara-dengan-keberhasilan-pendidikan/>

Yogyakarta, A. K. (202, Agustus 4). *Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta*. From Ensiklopedia Dunia – P2K STEKOM: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Akademi_Komunitas_Negeri_Seni_dan_Budaya_Yogyakarta

Yogyakarta, P. D. (2024, November 4). *Gubernur DIY Buka Kerjasama Bidang Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan Finlandia*. From Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/gubernur-diy-buka-kerjasama-bidang-pendidikan-riset-dan-teknologi-dengan-finlandia>